

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Fokus Pengamatan

Pengamatan berfokus pada prosedur pelaksanaan program *detention* dan hasil atau dampak dari program *detention* terhadap perilaku siswa. Untuk melihat kedua hal ini, penulis menggunakan arsip data program *detention* yang ada selama semester ganjil saat itu yaitu mulai tanggal 14 Juli 2014 – 21 November 2014.

Instrumen yang digunakan penulis adalah lembar wawancara (kepala sekolah, guru koordinator *detention*, konselor, dan guru mata pelajaran) dan lembar kuesioner (guru wali kelas, guru mata pelajaran, guru piket *detention*, dan siswa). Melalui instrumen tersebut, penulis menemukan informasi mengenai pelaksanaan program *detention* yaitu bagaimana setiap pihak yang terlibat di dalam program ini (kepala sekolah, guru, dan siswa) menjalankan prosedur pelaksanaan program *detention* sesuai dengan kebijakan sekolah. Penulis juga melihat kontribusi sekolah dalam hal penyediaan sarana dan prasarana untuk program *detention* ini.

Selain itu, penulis juga menemukan dampak program *detention* yaitu seberapa jauh program ini telah mencapai tujuannya. Hal ini dapat dilihat dari pendapat pihak-pihak yang terlibat (kepala sekolah, guru, dan siswa) dalam pelaksanaan program *detention*, mengenai seberapa efektif program ini jika dilihat dari posisi mereka masing-masing.

4.2. Temuan Laporan magang

Dalam laporan magang ini, setiap temuan akan dijabarkan menurut kegiatan persiapan dan pelaksanaan laporan magang yang deskripsi kegiatannya telah dijelaskan sebelumnya di Bab III.

1. 15-19 September 2014: Penulis mulai memiliki ketertarikan dalam program ini ketika menemukan arsip hasil refleksi *detention* siswa (Lampiran J). Penulis kemudian melanjutkan dengan pencarian informasi singkat mengenai apa dan bagaimana program *detention* tersebut.
2. 22 September 2014: Proses pengajuan izin. Penulis meminta persetujuan kepala sekolah untuk proses pengambilan data dalam pengamatan terhadap program *detention*. Pengajuan izin ini dilakukan secara informal yaitu dengan berdiskusi dengan kepala sekolah secara langsung mengenai ketertarikan penulis akan program *detention* dan kebutuhan penulis untuk menyelesaikan tugas akhir.
3. 23-3 Oktober 2014: Mencari data mengenai prosedur pelaksanaan *detention* melalui buku panduan pegangan guru dan siswa (Lampiran G & H). Buku panduan tersebut kemudian digunakan penulis untuk menyusun instrumen laporan magang (Lampiran A).
4. 13-24 Oktober 2014: Mempersiapkan instrumen laporan magang. Penulis membuat kuesioner dan menyusun pertanyaan wawancara sesuai dengan indikator.
5. 27 Oktober 2014: Penulis memberikan instrumen laporan magang dan data buku panduan guru dan siswa kepada kepala sekolah. Hal ini dilakukan

karena penulis memerlukan izin dari kepala sekolah sebelum melaksanakan wawancara dan menyebarkan kuesioner.

6. 10 November 2014: Validasi instrumen laporan magang oleh tiga validator (Lampiran B).
7. 12 November 2014: Mengumpulkan hasil *detention* siswa periode 17 Juli–11 November 2014. Hasil ini digunakan penulis untuk menentukan responden yang akan mengisi lembar kuesioner siswa.
8. 13 November 2014 – 20 November 2014: Melakukan wawancara dan menyebarkan kuesioner. Dalam tahap ini, penulis menemukan data tambahan untuk mendukung proses penulisan laporan magang. Data tersebut adalah *English Class Agreement* (Lampiran G).
9. 21 November 2014: Mengumpulkan hasil wawancara, kuesioner dan lembar pernyataan guru yang tidak menggunakan *detention* (Lampiran C, D, dan E).

4.3. Hasil Data

Hasil data akan dijabarkan berdasarkan setiap instrumen yang digunakan untuk mengukur indikator. Hasil yang ditunjukkan setiap instrumen tersebut akan dijabarkan secara deskriptif dengan memberikan jawaban dari setiap responden.

4.3.1. Lembar Kuesioner Siswa (Lampiran D-1)

Berdasarkan jawaban yang diberikan siswa terhadap pertanyaan no.1 maka, dapat dilihat bahwa sebagian besar siswa mendapatkan *detention* karena keterlambatan dalam suatu mata pelajaran tertentu atau saat devosi kelas. Selain karena keterlambatan, tiga orang siswa mendapatkan *detention* karena membawa makanan dan minuman (selain air mineral) di dalam kelas. Satu orang siswa

berpakaian tidak sesuai dengan seharusnya. Sementara dua orang siswa lainnya mendapatkan *detention* karena alasan lainnya yaitu tidak membawa buku yang dibutuhkan untuk kegiatan belajar mengajar.

Berdasarkan jawaban siswa untuk pertanyaan nomor dua, melalui tabel rekapitulasi kuesioner siswa (Lampiran F-1) dapat dilihat bahwa 27 dari 29 siswa jelas mengetahui adanya peraturan yang secara berulang telah dilanggar dan pada akhirnya hal ini membuat siswa-siswa tersebut mendapatkan *detention*. Peraturan tersebut juga telah disetujui oleh seluruh kelas terlihat adanya 27 siswa yang menjawab ya untuk pertanyaan ketiga. Sebelum akhirnya siswa menerima konsekuensi *detention*, siswa telah diperingati secara berulang oleh guru meskipun ada delapan siswa yang menyatakan bahwa mereka tidak mengalami proses tersebut. Hal ini dapat dilihat dari jawaban kedelapan siswa tersebut dalam pertanyaan nomor 4.

Setelah diputuskan bahwa siswa akan menerima konsekuensi *detention*, siswa akan menerima slip *after school detention* sehari sebelum *detention* untuk ditandatangani oleh orang tua. 24 dari 29 siswa menjawab ya dalam pertanyaan nomor 5 sehingga menyatakan bahwa mereka menerima slip *after school detention* melalui wali kelas sehari sebelum *detention*. Slip tersebut ternyata tidak semuanya ditandatangani oleh orang tua siswa. Melalui jawaban siswa dalam pertanyaan nomor enam dapat dilihat 15 siswa mengakui bahwa slip tersebut tidak ditandatangani oleh orang tua mereka. Slip yang seharusnya sudah ditandatangani tersebut juga harus dibawa ketika *detention* berlangsung. Akan tetapi, sebagian besar siswa (23 siswa) melalui pertanyaan nomor tujuh, menyatakan bahwa mereka tidak membawa slip tersebut. Slip *after school detention* kemudian

harusnya dikembalikan ke pihak sekolah dan ketika telah selesai melaksanakan *detention*, siswa menyimpan salah satu dari ketiga slip itu. Namun, hal ini tidak mungkin terjadi karena dari awal siswa sudah tidak membawa slip tersebut. Jawaban siswa terhadap pertanyaan nomor delapan menunjukkan bahwa 26 dari 29 siswa tidak menyimpan slip *after school detention*.

Sesuai dengan buku panduan pegangan guru (Lampiran H), *detention* dilaksanakan di ruangan koordinator yaitu di ruangan Mr. Yudhi pada hari Selasa & Kamis pukul 15.30-17.00. Akan tetapi delapan siswa lainnya tidak melaksanakan *detention* di tempat yang sudah ditentukan. Hasil ini diperoleh melalui jawaban siswa terhadap pertanyaan nomor sembilan.

Ketika *detention* dilaksanakan, siswa harus menandatangani daftar hadir yang telah disediakan. Dalam pertanyaan nomor 10, 26 siswa menyatakan bahwa mereka menandatangani daftar hadir tersebut. Selama *detention* berlangsung, siswa diharapkan melakukan setiap kegiatan dengan baik dan tidak melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan seperti tidur, ribut, berjalan-jalan, keluar kelas, dan lain sebagainya. 15 siswa tidak melakukan kegiatan lain selain yang seharusnya dilakukan namun, 14 lainnya menjawab pertanyaan nomor 11 dengan mengakui bahwa mereka melakukan beberapa tindakan yang seharusnya tidak dilakukan selama *detention* dilaksanakan.

Selama *detention*, siswa diwajibkan untuk melakukan beberapa kegiatan. Inti dari *detention* adalah menuliskan refleksi dengan beberapa pertanyaan panduan yang telah disediakan sekolah. Sebagian besar siswa (23 siswa) mengatakan bahwa mereka mengisi lembar refleksi itu dengan jujur, dapat dilihat

dari jawaban siswa tersebut pada pertanyaan nomor 12. Berdasarkan buku panduan dan pegangan guru (Lampiran H), selama siswa melakukan refleksi, harusnya didampingi oleh guru piket yang ada saat itu sehingga terjadi diskusi antara guru dan siswa mengenai beberapa hal penting yang harus diperhatikan berkenaan dengan pelanggaran yang telah dilakukan siswa. Hanya enam siswa yang mengatakan bahwa mereka melalui proses itu sementara 23 siswa lainnya mengakui tidak ada proses diskusi yang terjadi antara siswa dan guru saat itu. Hasil ini diperoleh berdasarkan jawaban siswa terhadap pertanyaan nomor 13.

Kegiatan lain yang akan dilakukan siswa setelah menuliskan refleksi adalah membaca buku dan melakukan kegiatan sosial lain sesuai dengan instruksi dari guru piket saat itu. 11 dari 29 siswa melakukan kegiatan membaca buku. 11 siswa tersebut menjawab ya pada pertanyaan nomor 14. Setelah membaca buku, siswa juga harus membuat ringkasan/ resensi dari buku yang dibacanya tersebut. 15 siswa mengatakan melalui jawaban pertanyaan nomor 15 bahwa mereka menulis ringkasan buku. Jika masih banyak waktu yang tersisa untuk *detention*, guru memberikan beberapa instruksi untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. 27 siswa menjawab tidak untuk pertanyaan nomor 16 karena mereka tidak diberikan instruksi untuk melakukan suatu kegiatan tertentu.

Detention merupakan konsekuensi awal dari adanya pendisiplinan selanjutnya bila siswa masih melakukan kesalahan. Salah satunya yaitu adanya bimbingan oleh konselor sekolah. Hanya 3 dari 29 siswa yang menyatakan bahwa mereka mendapat bimbingan lebih lanjut oleh konselor sekolah. Hasil ini diperoleh melalui jawaban siswa terhadap pertanyaan nomor 17. Selain bimbingan konselor, surat peringatan dan dirumahkan menjadi konsekuensi selanjutnya. 28

siswa melalui pertanyaan nomor 18 mengatakan tidak mendapatkan konsekuensi ini. Hal ini berkaitan dengan hasil yang didapat dalam pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 19 yang menunjukkan sebagian siswa (17 siswa) merasa menjadi pribadi yang lebih baik melalui *detention* ini.

Pertanyaan terakhir (nomor 20) menunjukkan hasil yang berbeda. Meskipun ada 17 siswa yang merasa menjadi pribadi yang lebih baik namun, hanya 11 siswa yang menyadari adanya manfaat dari program *detention* ini. Bagi siswa-siswa ini, *detention* sudah cukup membuat mereka jera dan tidak ingin melakukan pelanggaran lagi terhadap peraturan sekolah. Akan tetapi, 18 siswa lainnya menganggap *detention* sebagai suatu hal yang membosankan dan tidak membuat mereka jera.

4.3.2. Lembar Kuesioner Guru Wali Kelas (Lampiran D-2)

Dari tujuh guru wali kelas yang menjadi responden dalam laporan magang ini, tiga diantaranya tidak memiliki peraturan *homeroom* yang berkonsekuensi *detention*. Dilihat dari jawaban ketiga guru tersebut pada pertanyaan nomor satu. Keempat guru lainnya memiliki peraturan dengan konsekuensi *detention* dan peraturan ini telah disetujui oleh seluruh siswa yang menjadi wali dari guru tersebut. Hal ini dapat diketahui melalui jawaban keempat guru tersebut pada pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan nomor dua. Diikuti oleh pertanyaan nomor tiga yang menunjukkan bahwa setiap guru ini juga selalu memperingatkan siswa (minimal tiga kali) sebelum akhirnya memutuskan untuk memberikan konsekuensi *detention*. Melalui pertanyaan nomor empat, dapat diketahui bahwa setelah memberikan konsekuensi kepada siswa, keempat guru wali kelas juga

selalu memberitahukan nama-nama siswa yang mendapatkan *detention* kepada koordinator *detention* yaitu Mr. Yudhi.

Ada beberapa tanggungjawab wali kelas berkenaan dengan penerapan program *detention* ini. Pertama, siswa yang diberikan *detention* namanya harus dicatat oleh wali kelas dalam *subject journal*, *class journal*, dan *homeroom journal* sebagai data kelas. Lima orang guru wali kelas menyatakan bahwa mereka selalu mencatat nama-nama siswa yang mendapatkan *detention*. Hasil ini diperoleh melalui jawaban kelima guru tersebut pada pertanyaan nomor lima. Selanjutnya, guru wali kelas juga diharapkan dapat memberikan slip *after school detention* kepada siswa maksimal sehari sebelum *detention* berlangsung untuk ditandatangani oleh orang tuanya. Setelah ditandatangani, guru wali kelas juga harus menyimpan salah satu slip. Sebagian besar guru telah melakukan hal ini (6 dari 7 guru). Hal ini dapat dilihat dari jawaban guru wali kelas pada pertanyaan nomor enam dan tujuh.

Untuk menangani siswa yang mendapatkan *detention*, semua guru wali kelas berdasarkan buku panduan pegangan guru (Lampiran H) diharapkan dapat bekerjasama dengan guru lain, konselor, CCTT, dan kepala sekolah. Setiap guru wali kelas berdasarkan jawabannya terhadap pertanyaan nomor delapan mengakui bahwa masing-masing mereka melakukan konsultasi mengenai penanganan perilaku siswa yang kurang baik khususnya bagi siswa yang pernah mendapatkan *detention*. Selanjutnya, jawaban setiap guru wali kelas terhadap pertanyaan nomor sembilan menunjukkan bahwa bukan hanya kepada sesama rekan kerja, guru wali kelas juga mendiskusikan sikap siswa yang kurang baik tersebut dengan siswanya sendiri.

Jawaban dari pertanyaan kesepuluh dalam kuesioner ini menunjukkan bahwa 3 dari 7 guru wali kelas tidak menerima lembar hasil *detention* siswa. 4 guru wali kelas lainnya mengaku memiliki arsip lembar hasil *detention* siswa.

Pertanyaan terbuka yang menjadi pertanyaan terakhir dalam kuesioner ini menunjukkan cara guru wali kelas dalam menangani siswa yang melakukan pelanggaran berulang kali. Secara garis besar, setiap guru wali kelas menyatakan bahwa masing-masing mereka akan memilih untuk bekerjasama dengan konselor, CCTT, kepala sekolah, bahkan orang tua dari siswa yang bersangkutan, untuk mendiskusikan langkah-langkah selanjutnya yang harus dilakukan masing-masing pihak untuk memperingatkan atau bahkan memberikan konsekuensi bagi siswa yang melakukan pelanggaran secara berulang tersebut. Diskusi juga dilakukan dengan siswa itu sendiri.

4.3.3. Lembar Kuesioner Guru Mata Pelajaran (Lampiran D-3)

11 orang guru mata pelajaran menjadi responden yang mengisi kuesioner ini. Jawaban kesebelas guru ini terhadap pertanyaan nomor satu menunjukkan bahwa peraturan yang memiliki konsekuensi *detention* telah dikomunikasikan terlebih dahulu kepada siswa. Sebagian dari mereka (6 orang guru mata pelajaran) tidak membutuhkan persetujuan siswa untuk peraturan tersebut. Hasil ini ditunjukkan oleh jawaban yang diberikan setiap guru terhadap pertanyaan nomor dua.

Sebelum memutuskan untuk memberikan *detention* kepada siswa, setiap guru telah memperingatkan siswa berulang kali (minimal tiga kali). Hal ini dapat dilihat melalui jawaban setiap guru terhadap pertanyaan nomor tiga. Setelah

memberikan *detention*, dua dari 11 guru mata pelajaran menyatakan melalui jawaban mereka terhadap pertanyaan nomor empat bahwa, mereka tidak mencatat nama siswa yang diberikan *detention*, dalam *subject journal* dan *class journal*. Akan tetapi, setiap guru mata pelajaran yang menjadi responden dalam laporan magang ini menyatakan bahwa mereka selalu memberitahu nama-nama siswa yang mendapat *detention* kepada koordinator *detention* yaitu Mr. Yudhi. Hasil ini diketahui melalui jawaban setiap guru terhadap pertanyaan nomor lima.

Pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan nomor enam menunjukkan bahwa setiap guru mata pelajaran memiliki cara tersendiri dalam menangani siswa yang tetap melakukan pelanggaran meskipun telah menerima konsekuensi *detention*. Salah satu dari ketujuh guru ini mengakui bahwa hal yang paling penting baginya adalah berdoa untuk siswa tersebut karena menurut guru tersebut, hanya Tuhan Yesus melalui Roh Kudus yang sanggup mengubah hati dan *detention*, diskusi, ataupun komunikasi lainnya hanyalah sarana. Secara garis besar, guru yang lain mengatakan bahwa mereka akan melakukan diskusi dengan siswa yang bersangkutan untuk mencari solusi kedepannya seperti apa sikap yang diharapkan dilakukan oleh siswa tersebut. Dalam proses ini akan ada surat perjanjian yang dibuat oleh siswa. Surat perjanjian ini berisi komitmen siswa mengenai penanganan perilakunya sesuai dengan yang sudah didiskusikan sebelumnya. Cara yang lain, guru mata pelajaran akan bekerjasama dengan guru wali kelas, konselor, CCTT, kepala sekolah, dan orang tua apabila perilaku yang ditunjukkan oleh siswa tersebut tidak kunjung mengalami perubahan.

4.3.4. Lembar Kuesioner Guru Piket (Lampiran D-4)

Enam orang guru piket menjadi responden dalam pengisian lembar kuesioner ini. Setiap guru piket menjawab ya pada pertanyaan nomor satu sehingga masing-masing guru piket mengakui bahwa mereka hadir dalam ruangan *detention* tepat waktu. Keenam guru piket juga memberikan daftar hadir yang harus ditandatangani oleh siswa ketika siswa memasuki ruangan *detention*. Hasil ini dilihat dari jawaban guru piket terhadap pertanyaan nomor dua dalam lembar kuesioner.

Selama *detention* berlangsung, guru piket memiliki beberapa tugas yang harus dilaksanakan. Awalnya, guru piket akan memberikan lembar refleksi yang harus dilengkapi siswa. Setiap guru piket mengatakan bahwa mereka melakukan hal ini dan terlihat dari jawaban mereka terhadap pertanyaan nomor tiga dalam lembar kuesioner. Melalui pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan nomor empat, dapat dilihat bahwa keenam guru ini mengawasi setiap siswa dalam proses melengkapi lembar refleksi tersebut. Setelah selesai menuliskan refleksi, siswa diharuskan untuk membaca buku. Empat dari enam guru piket menjawab ya pada pertanyaan nomor lima yang berarti bahwa keempat guru piket ini menyiapkan bukunya sendiri untuk diberikan kepada siswa. Dua lainnya tidak memberikan buku kepada siswa. Setelah membaca buku, siswa harus menuliskan ringkasan dari buku tersebut. Sebagian besar guru piket (lima orang guru) memberikan lembar ringkasan yang harus dilengkapi siswa. Kelima guru ini juga kemudian memastikan bahwa siswa mengisi lembar ringkasan tersebut dengan baik. Hal ini dilihat dari jawaban guru piket terhadap pertanyaan nomor enam dan tujuh.

Selama *detention*, setiap guru menegur siswa yang melakukan tindakan-tindakan lain selain yang seharusnya dilakukan selama *detention*. Tindakan-tindakan ini misalnya, tidur, ribut, atau hal-hal lainnya yang mengganggu kelancaran proses *detention*. Hasil ini diperoleh dari jawaban setiap guru terhadap pertanyaan nomor delapan dimana setiap guru menjawab ya untuk pertanyaan ini. Selain itu, sebagian guru piket (tiga orang guru piket) melalui pertanyaan nomor sembilan mengakui bahwa selama *detention* berlangsung, mendiskusikan dengan siswa hasil refleksi yang dituliskan oleh siswa tersebut dan menekankan pada hal-hal penting yang dilakukan siswa berdasarkan pelanggaran siswa.

Setelah melakukan refleksi, membaca buku, dan menuliskan ringkasan, dua dari enam guru piket memberikan instruksi bagi siswa untuk melakukan kegiatan sosial lain. Kegiatan yang dilakukan siswa biasanya adalah membereskan meja dan kursi, ataupun membantu guru dalam kegiatan yang lain. Hal ini dapat dilihat melalui jawaban setiap guru piket terhadap pertanyaan nomor 10.

Setelah *detention* selesai dilaksanakan, setiap guru harus memberikan hasil *detention* siswa kepada koordinator *detention*. Setiap guru selalu memberikan hasil *detention* kepada guru koordinator dilihat dari jawaban mereka terhadap pertanyaan nomor 11.

Pertanyaan terakhir (nomor 12) memberikan kesempatan bagi setiap guru piket untuk memberikan pendapatnya mengenai program *detention* ini. Berdasarkan pengalaman setiap guru piket, mereka mengakui adanya dampak dari program *detention* bagi sebagian siswa. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa untuk sebagian siswa, program *detention* adalah suatu kegiatan sia-sia yang tidak

memiliki dampak dalam kehidupan mereka pribadi. Beberapa siswa menunjukkan perubahan dengan lebih menaati peraturan kelas dan sekolah namun ada pula beberapa siswa yang terus melakukan pelanggaran walaupun telah melakukan *detention* berulang kali.

4.3.5. Lembar Wawancara Kepala Sekolah (Lampiran C-1)

Melalui hasil wawancara dengan kepala sekolah, penulis menemukan bahwa tujuan dari SMA X menjalankan program *detention* adalah sebagai suatu cara untuk mengendalikan terlaksananya 3R yaitu *Respect*, *Responsibility*, dan *Readiness* dalam kehidupan masing-masing siswa. Kepala sekolah berharap, *detention* dapat menjadi sarana untuk membantu siswa berpikir dan merenung secara mandiri melalui beberapa pertanyaan bimbingan. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini akhirnya adalah agar supaya siswa dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa yang dilakukannya adalah suatu hal yang keliru sehingga kedepannya siswa yang bersangkutan dapat lebih baik lagi dalam merencanakan penggunaan waktunya dan mengontrol emosi, ataupun dalam aspek kedisiplinan lainnya.

Sebelum guru akhirnya memberikan *detention* kepada siswa, guru tersebut harus memiliki peraturan dengan konsekuensi *detention*. Setiap kelas tentu memiliki peraturan kelas yang berbeda berdasarkan kebijakan dari masing-masing guru. Melihat hal ini, tentu sekolah harus menentukan suatu standard peraturan agar setiap peraturan kelas ada dalam suatu koridor yang sama. Visi, misi, profil lulusan, dan profil sekolah menjadi acuan guru untuk menentukan peraturan yang wajib ditaati oleh setiap siswa. Untuk memastikannya, kepala sekolah melakukan pemantauan dan komunikasi secara informal maupun formal

dalam rapat atau laporan tertulis. Selain itu, guru juga difasilitasi dengan adanya waktu khusus yang diberikan sekolah untuk membahas visi, misi, dan profil lulusan dari SMA X.

Kepala sekolah memberikan ruang kepada guru untuk menentukan sikap-sikap murid yang perlu diatasi dengan peraturan kelas yang memiliki konsekuensi *detention*. Hal ini dikarenakan adanya pemahaman sekolah bahwa guru adalah orang yang berinteraksi secara intensif dengan siswa. Untuk itu, guru lebih mengenal siswa sehingga, ada beberapa guru yang mungkin memilih pendekatan yang lain dalam menangani sikap-sikap tertentu dari siswa. Beberapa guru juga memilih untuk tidak menggunakan *detention* sebagai konsekuensi dari peraturan di dalam kelas. *Detention* bukan program yang wajib diimplementasikan oleh setiap guru di SMA X. Dampak yang diberikan oleh program ini tidaklah sama bagi setiap siswa. Dengan demikian, guru diharapkan dapat melakukan pendekatan yang berbeda dalam mengatasi masalah perilaku siswa.

Selain berbagai peraturan yang ada di dalam kelas, kepala sekolah mengakui bahwa berkenaan dengan peraturan, ada hal-hal yang memang perlu diseragamkan dalam lingkup sekolah secara umum. Saat ini di SMA X, peraturan yang diseragamkan oleh sekolah dan memiliki konsekuensi *detention* adalah keterlambatan siswa untuk datang ke sekolah.

Jika dilihat dari hasilnya, menurut kepala sekolah, program ini sangat membantu beberapa siswa. Akan tetapi untuk siswa yang lain, jenis pendisiplinan seperti ini terkesan terlalu lembut. Misalnya, ketika siswa terlambat datang ke sekolah, siswa tersebut diizinkan masuk namun, harus menerima konsekuensi

detention. Selama *detention*, siswa hanya diminta untuk menuliskan refleksi sesuai dengan beberapa pertanyaan penuntun yang diberikan pihak sekolah. Konsekuensi seperti ini terlihat sangat ringan mengingat kebudayaan dari siswa yang sudah terbiasa untuk hidup keras termasuk didalamnya cara pendisiplinan yang keras dalam kehidupan mereka sehari-hari. Untuk itu, *detention* hanya menjadi salah satu cara dalam membantu siswa meningkatkan kedisiplinan. Langkah selanjutnya adalah dengan memberikan surat peringatan. Mungkin melalui penanganan setelah *detention* inilah, siswa akan mengerti bahwa pelanggaran yang dilakukannya benar-benar salah.

Sebagai pemimpin, kepala sekolah SMA X selalu memantau program ini dengan melihat perkembangannya selama satu kuartar. Kepala sekolah secara pribadi tidak menyimpan arsip dari program *detention* namun, kepala sekolah selalu menerima laporan dari koordinator *detention*. Melalui pelaporan ini, akan dilihat siswa yang pernah mendapatkan *detention* sehingga kepala sekolah akan menindaklanjutinya dengan berbagai kebijakan lainnya dan dapat disampaikan dalam pertemuan dengan orang tua.

Seiring dengan berjalannya program *detention* ini, kepala sekolah menyadari adanya beberapa hal yang harus ditingkatkan sehingga akhirnya dapat mencapai hasil yang lebih baik lagi. Kepala sekolah merasa perlu mengadakan *review* program *detention* yang dilakukan bersama-sama yaitu seluruh pihak yang terlibat dalam program ini untuk melihat ketercapaian tujuan yang dimaksudkan dan hal-hal yang perlu diperbaiki kedepan.

4.3.6. Lembar Wawancara Guru Mata Pelajaran (Lampiran C-2)

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, guru memiliki kebijakannya masing-masing dalam menentukan peraturan yang memiliki konsekuensi *detention*. Sebagian guru akan memberikan *detention* ketika siswa mengganggu proses belajar mengajar di dalam kelas yaitu saat siswa membuat keributan, mengganggu temannya, berbicara kotor, makan dan minum di dalam kelas (selain air mineral), ataupun terlambat masuk kelas ketika terjadi pergantian kelas. Siswa juga akan mendapatkan *detention* jika tidak membawa kelengkapan belajar seperti buku tulis, buku cetak, alat tulis menulis atau bahan membuat *project*, dan tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Beberapa guru memilih untuk memberikan konsekuensi kepada siswa yang melanggar peraturan sekolah secara umum yaitu ketika siswa tidak menggunakan seragam sekolah dengan baik dan benar atau ketika siswa bolos dari kelas. Setiap peraturan ini akan terlebih dahulu mendapatkan peringatan minimal tiga kali sebelum akhirnya guru memutuskan untuk memberikan *detention* kepada siswa. Untuk *English Team*, peraturan telah diseragamkan secara umum dan setiap guru Bahasa Inggris harus menggunakan peraturan ini (Lampiran G).

Setiap guru memiliki pertimbangannya masing-masing berkenaan dengan alasan menggunakan konsekuensi *detention* untuk peraturan tersebut. Guru di SMA X melihat *detention* sebagai suatu konsekuensi yang dangat menyakitkan bagi siswa. *Detention* akan menguras waktu bermain, *after school*, atau les. Setiap kegiatan yang ingin siswa lakukan setelah jam sekolah berakhir harus diganti dengan menerima konsekuensi yang menurut para siswa hanya membuang-buang waktu mereka. Beberapa guru juga berharap bahwa dengan melakukan *detention*,

siswa diberikan waktu untuk memikirkan kesalahannya apalagi siswa tersebut sebenarnya telah diperingatkan sebanyak tiga kali sebelum mendapatkan *detention*.

Menurut guru mata pelajaran SMA X, *detention* mungkin terkesan menjadi konsekuensi yang tidak berhubungan dengan peraturan di dalam kelas. Akan tetapi, *detention* menjadi konsekuensi yang paling ditakuti oleh siswa sehingga guru-guru di SMA X memilih untuk menggunakan *detention* sebagai konsekuensi peraturan di dalam kelas.

Ada pula guru yang lebih memilih untuk menggunakan peraturan yang lebih umum yaitu peraturan sekolah sebagai peraturan di dalam kelas yang dikenakan konsekuensi *detention*. Hal ini dikarenakan adanya anggapan dari guru tersebut bahwa *detention* merupakan program dari sekolah sehingga peraturan sekolahlah yang dianggap pantas untuk memiliki konsekuensi *detention*. Peraturan kelas lainnya seperti kelengkapan belajar dan masalah perilaku siswa selama berada di dalam kelas, ditangani oleh guru yang bersangkutan karena menurutnya, yang mengatur standard untuk hal-hal tersebut adalah guru yang sedang mengajar, tidak menggunakan peraturan sekolah secara umum.

Selain itu, *detention* juga menjadi pilihan para guru sebagai konsekuensi peraturan di dalam kelas karena program pendisiplinan ini merupakan konsekuensi awal bagi siswa sebelum mendapatkan konsekuensi lainnya jika siswa yang bersangkutan tetap melakukan pelanggaran dan secara terus-menerus mendapatkan *detention*. Apabila siswa terus melakukan pelanggaran maka, siswa tersebut akan mendapatkan tindakan pendisiplinan selanjutnya berupa

pengurangan nilai afektif menjadi C, pemberian surat peringatan, bahkan sampai dirumahkan.

Berdasarkan pengamatan dari setiap guru di SMA X, *detention* sudah cukup efektif jika melihat beberapa siswa yang jera karena telah mendapatkan *detention*. Selain memberikan efek jera, program ini juga memberikan pengertian kepada siswa bahwa sekolah memiliki peraturan yang berkonsekuensi *detention*. Peraturan kelas hanya efektif di dalam kelas saja. Akan tetapi, dengan adanya program sekolah secara menyeluruh yaitu segala peraturan yang memiliki konsekuensi umum pula (*detention*), hal ini membantu guru dalam melakukan kontrol perilaku siswa dalam lingkup sekolah secara keseluruhan selama jam sekolah berlangsung.

Detention juga dianggap efektif karena pendisiplinan seperti ini dilihat sebagai suatu perwujudan kasih guru kepada siswanya. Bukan lagi zamannya memberikan konsekuensi fisik kepada siswa. Walaupun *detention* terkesan ringan bagi beberapa siswa, namun kegiatan ini dapat menumbuhkan kesadaran diri dari siswa yang bersangkutan. *Detention* menjadi media introspeksi diri dan konsekuensi ini merupakan suatu konsekuensi yang lebih manusiawi jika dibandingkan dengan sekolah lainnya yang sampai saat ini masih menerapkan konsekuensi kasar secara fisik untuk mendisiplinkan siswanya.

Menurut guru mata pelajaran SMA X, memang program pendisiplinan ini mungkin tidak efektif bagi sebagian siswa yang mendapatkan *detention* berkali-kali. Akan tetapi, menurut pendapat guru SMA X, efektif tidaknya program ini tidak tepat jika hanya diukur pada saat ini. Jika melihat siswa yang telah lulus,

beberapa dari mereka sempat berterimakasih kepada pihak sekolah karena mereka belajar untuk berefleksi, menilai, dan lebih mengenal diri sendiri melalui *detention*. Untuk saat ini, efektifnya program dilihat berdasarkan perubahan sikap siswa selama bersekolah dan seberapa banyak dia mengikuti *detention* namun, dampaknya ternyata lebih besar dari itu karena yang dihasilkan adalah suatu efek jangka panjang yang berguna dalam pembentukan karakter setiap siswa.

Selama program ini diterapkan, guru SMA X menilai bahwa program ini sudah baik jika dilihat dari prosedur dan kegiatan yang harus dilakukan siswa selama *detention*. Prosedur telah ditulis dengan jelas dan setiap guru wajib mengikuti prosedur tersebut. Selain itu, ada pihak yang bertanggung jawab akan pelaksanaan program ini yaitu guru koordinator. Prosedur pelaksanaan ini bahkan melibatkan orang tua dan hal itu sangat baik. Pertanyaan refleksi juga sudah sangat baik untuk menuntun siswa dalam menyadari pelanggaran peraturan yang dilakukannya.

Untuk meningkatkan kualitas program pendisiplinan ini, setiap guru mata pelajaran memiliki beberapa pendapat mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki. Sebagian guru berpendapat bahwa program ini tidak memberikan proses rekonsiliasi antara guru yang memberikan *detention* dengan siswa yang melakukan pelanggaran. Siswa memiliki masalah perilaku di dalam kelas dan harus berakhir dengan guru lain yang menjaganya selama *detention*. Selain tidak memberikan rekonsiliasi dengan guru yang bersangkutan, kegiatan ini juga menjadi beban bagi guru lain yang seharusnya dapat meninggalkan sekolah sesuai dengan jam berakhirnya sekolah tetapi, harus menjadi pengawas dalam kegiatan *detention* ini. Kalaupun akhirnya harus melakukan *detention* dengan guru yang

lain, guru yang memberikan *detention* harusnya diberikan kesempatan untuk melihat hasil *detention* dari siswa tersebut. Ini dilakukan agar supaya guru mendapatkan umpan balik sebagai hasil dari konsekuensi yang diberikannya di dalam kelas.

Beberapa guru juga menilai *detention* sebagai suatu konsekuensi yang kurang berhubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Beberapa guru menyarankan bahwa, selain melakukan refleksi, kegiatan yang dilakukan selama *detention* harusnya dapat lebih bervariasi lagi. Misalnya, ketika siswa tidak membawa buku pelajaran Sejarah sebagai kelengkapan selama proses belajar mengajar, ketika *detention* siswa diwajibkan untuk membaca buku tersebut. Hal ini dilakukan untuk memberikan pengertian kepada siswa bahwa membaca buku itu penting.

Di sisi lain, ada beberapa guru melihat peningkatan kualitas dari program ini dapat terjadi jika masing-masing guru menyadari perannya di dalam kelas. Guru bertanggung jawab untuk menolong siswa belajar. Untuk itu, penggunaan metode belajar dan manajemen kelas yang baik harusnya dapat meminimalisir permasalahan perilaku siswa. Selain itu, pihak sekolah juga dapat memberi bantuan menyangkut manajemen kelas dari setiap guru. Misalnya, ketika kegiatan *professional development*, guru diberikan kesempatan untuk mendiskusikan perilaku beberapa siswa yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Dengan demikian, guru dapat lebih spesifik memerhatikan siswa yang memiliki permasalahan perilaku selama proses belajar mengajar berlangsung. Bukan berarti siswa yang lain diabaikan, tapi setidaknya ketika guru mengendalikan siswa yang

seperti ini, proses belajar mengajar dapat menjadi lebih kondusif dan materi dapat berjalan dengan baik.

4.3.7. Lembar Wawancara Guru Koordinator *Detention* (Lampiran C-3)

Guru koordinator *detention* bertanggung jawab untuk melaksanakan program *detention* sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pihak sekolah (Lampiran H). Guru harus memastikan bahwa program *detention* dilaksanakan dengan maksimal oleh setiap pihak yang terlibat dalam program ini.

Hasil wawancara penulis dengan guru koordinator *detention* menunjukkan bahwa *detention* tidak selalu dilaksanakan di ruangan guru koordinator tetapi di ruangan guru piket yang saat itu bertugas. Menurut guru koordinator *detention*, seharusnya memang ada ruangan khusus untuk *detention* namun, guru koordinator memberikan kebebasan kepada guru piket untuk melaksanakan *detention* di ruangan mereka masing-masing karena hal ini akan lebih efektif mengingat banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan oleh guru setelah jam pulang sekolah. Guru koordinator mencoba beradaptasi dengan keadaan dan kebutuhan guru yang ada sehingga guru yang bersangkutan tidak hanya sekedar menunggu siswa tetapi, dapat sambil mengerjakan tugas mereka masing-masing. Perubahan tempat ini tidak diberitahukan secara formal kepada CCTT atau kepala sekolah tapi secara informal guru koordinator yakin bahwa pihak sekolah sudah mengetahuinya sekaligus menyetujuinya. Jika tidak, tentu akan ada teguran dari pihak sekolah.

Guru koordinator *detention* juga menyadari adanya tugas yang harus dilaksanakannya berkenaan dengan pelaksanaan program *detention* diantaranya adalah menyiapkan peralatan yang diperlukan selama *detention* dilaksanakan.

Daftar hadir siswa dan lembar refleksi selalu diberikan kepada guru yang bertugas saat itu. Daftar ini selalu dikembalikan karena akan direkap bersamaan dengan hasil refleksi dari siswa. Selain itu, hanya ada satu dokumen pertanyaan penuntun refleksi. Dengan demikian, guru koordinator harus mengambil pertanyaan penuntun ini juga daftar hadir maksimal keesokan harinya mengingat *detention* dilaksanakan dua minggu sekali. Untuk perlengkapan lainnya seperti buku, guru tidak menyediakan karena di SMA X dalam pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris ada kegiatan membaca tenang (*Sustain Silence Reading*) sehingga mereka pasti punya buku. Dalam hal pengontrolan buku yang dibaca oleh siswa mengenai baik atau tidaknya buku tersebut, guru menggunakan resensi buku. Sebelumnya, program *detention* hanya mewajibkan siswa untuk membaca buku namun, guru koordinator berinisiatif untuk membuat format resensi buku dibantu oleh guru Bahasa Indonesia. Hal ini dilakukan karena guru koordinator *detention* melihat bahwa apabila hanya membaca buku sepintas lalu, itu hanya akan membuang-buang waktu. Dengan demikian, membaca buku dikemas dengan lebih bermakna karena dibarengi dengan adanya penulisan resensi buku.

Ketika *detention* dilaksanakan, tentu ada beberapa siswa yang mengantuk, mengganggu temannya, atau ingin keluar kelas. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan guru koordinator *detention*, ketika siswa mulai mencoba melakukan hal ini guru koordinator akan menegur. Menurutnya, *detention* adalah waktu untuk refleksi bagi siswa. Hal ini sangat penting sehingga harus dilakukan dengan serius. Dengan menyadari pentingnya hal ini, guru juga memiliki kewajiban untuk menjaga siswa untuk tetap serius.

Seperti yang tercantum dalam prosedur pelaksanaan *detention* (Lampiran H), seharusnya guru mendiskusikan hal-hal penting mengenai pelanggaran yang dilakukan siswa sehingga mendapatkan *detention*. Akan tetapi menurut guru koordinator *detention* yang juga merupakan guru piket, dirinya dan beberapa guru yang lain jarang mendiskusikannya dengan siswa. Namun, hasil *detention* selalu dibaca dan untuk beberapa hasil yang perlu ditindaklanjuti, diserahkan kepada guru wali kelas. Guru koordinator tidak mengajar semua kelas dan menurutnya, dirinya secara pribadi tidak dapat melihat perkembangan siswa. Untuk itu, guru koordinator menyerahkan kepada guru wali kelas yang pasti lebih mengenal masing-masing siswa. Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah dengan merujuk siswa tersebut ke konselor sekolah.

Hasil *detention* selalu diarsipkan oleh guru koordinator sebagai dokumen sekolah. Keseluruhan arsip ini tidak diberikan kepada CCTT dan kepala sekolah namun guru koordinator selalu memberikan laporan dalam rentang waktu tertentu. Hanya kasus-kasus ekstrim dan membutuhkan kebijakan lebih lanjut oleh sekolah yang dilaporkan secara langsung oleh guru koordinator kepada CCTT dan kepala sekolah. Misalnya, beberapa waktu yang lalu siswa SMA X yang harusnya melaksanakan *detention*, tidak hadir sesuai jadwal dan hal ini terjadi berulang kali. Konsekuensi yang harusnya diterima oleh siswa ini adalah *detention* yang terus-menerus bertambah jumlahnya karena dilipatgandakan. Menurut guru koordinator *detention*, hal ini tidak efektif jika dia harus melakukan *detention* berulang-ulang kali sesuai dengan jumlah *detention* yang telah dilipatgandakan. Untuk menangani hal ini, guru koordinator *detention* akhirnya berdiskusi dengan kepala sekolah mengenai konsekuensi yang tepat apabila siswa tidak hadir untuk melaksanakan

detention. Hasilnya, saat ini jika siswa tidak datang empat kali berturut-turut maka, siswa akan diberikan kerja sosial pada hari sabtu di panti asuhan yang bekerjasama dengan sekolah yaitu Panti Asuhan Titipan Kasih. Jika dia tidak datang dalam kegiatan tersebut, konsekuensi selanjutnya adalah pemberian surat peringatan. Tapi sampai saat ini berdasarkan informasi yang diperoleh penulis melalui guru koordinator *detention*, belum ada kasus yang membuat sekolah mengeluarkan surat peringatan kepada siswa berkenaan dengan *detention*.

Secara pribadi, guru koordinator melihat program pendisiplinan ini telah efektif. Meskipun memang ada beberapa siswa yang terlihat kebal dengan konsekuensi ini. Hal ini wajar karena perkembangan siswa tidak dapat disamaratakan. Akan tetapi, presentase keberhasilan program ini lebih besar daripada kegagalannya. *Detention* tidak dapat dikatakan gagal hanya karena beberapa oknum yang terlihat kebal dengan konsekuensi ini.

Guru koordinator juga melihat bahwa siswa-siswi di SMA X adalah pribadi yang terbuka. Artinya, hal-hal yang memang sedang dipikirkan dan dirasakan, itulah yang ditulis sehingga setiap hasil *detention* tidak mengada-ngada. Banyak siswa yang dengan berani menuliskan pendapatnya mengenai program ini meskipun pandangan tersebut merupakan pandangan yang tidak baik (Lampiran J).

4.3.8. Lembar Wawancara Konselor (Lampiran C-4)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan kedua konselor di SMA X, mereka masing-masing selalu menerima slip *after school detention* dari koordinator. Slip ini kemudian disimpan bersamaan dengan data

lainnya dari siswa yang bersangkutan. Arsip setiap siswa ini menyimpan setiap catatan kegiatan siswa, kasus, dan jadwal konseling.

Menurut kedua konselor ini, siswa yang di konseling biasanya karena dirujuk oleh guru wali kelas atau guru piket yang mendampingi selama *detention*. Hal ini dilakukan karena melihat hasil lembar refleksi dari siswa tersebut yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari program *detention* ini.

Melalui hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan konselor, dapat diketahui pula peran konselor dalam program *detention* ini. Konselor tidak memberikan *detention*. Peran konselor adalah untuk mengembalikan atau memulihkan kondisi anak kepada suatu keadaan adaptif yang mengharuskan dirinya untuk melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan harapan sekolah melalui batasan-batasan yang dimiliki sekolah dalam suatu peraturan tertentu. Konselor berusaha menggali kesulitan dari siswa sehingga dapat diketahui akar masalah yang mungkin saja dapat berupa manajemen waktu, disiplin diri, atau kurangnya motivasi dari siswa tersebut yang semuanya ini berakibat pada tindakannya di dalam kelas. Selain itu, konselor di SMA X juga harus bersedia menjadi pengganti guru piket apabila guru tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya karena adanya suatu halangan tertentu. Konselor juga memiliki tugas untuk membuat program selanjutnya kepada siswa yang selalu menerima *detention*, misalnya program buku kontrol atau memberikan surat peringatan yang mengharuskan siswa untuk dirumahkan setelah melalui beberapa penanganan.

Menurut konselor SMA X, program *detention* secara umum telah berjalan dengan baik. Bagi beberapa siswa, program ini sangat berdampak namun, hal ini tentu tidak dapat disamaratakan kepada seluruh siswa. Bagi sebagian siswa, konsekuensi ini terlalu lembut sehingga *detention* tidak memberikan dampak. Dalam kasus ini, guru mata pelajaran, guru wali kelas, dan konselor dapat bekerjasama untuk membimbing siswa tersebut. Selain itu, berdasarkan pendapat dari konselor SMA X, *detention* dapat berjalan dengan lebih efektif jika guru yang mendampingi siswa selama *detention* benar-benar mengerti tugas dan tanggungjawabnya. Guru piket ada pada saat *detention* bukan karena guru tersebut tidak memiliki pekerjaan yang lain sehingga ditugaskan untuk menjaga *detention*. Tetapi setiap guru piket harusnya memahami gambaran besarnya yaitu bahwa siswa yang melaksanakan *detention* harus ditolong sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan siswa selama *detention* bersama guru piket juga dilandaskan pada pemahaman yang benar terhadap tujuan yang ingin dicapai melalui *detention* ini.

Sebagai saran untuk program *detention*, konselor SMA X mengatakan bahwa setiap guru harus lebih memahami perannya dalam pelaksanaan program *detention* ini. Aktivitas dalam *detention* harusnya dapat menjadi kesempatan bagi guru untuk dapat berbicara dengan siswa. Misalnya ketika siswa diminta untuk merapikan rak buku bersama dengan guru piket, saat itu dapat dibarengi dengan beberapa perbincangan mengenai perilaku siswa. Hal ini tidak dapat tercapai bila guru tersebut tidak mengerti dengan benar tujuan dari *detention*.

Selain itu, menurut konselor SMA X, kegiatan yang dilakukan siswa selama *detention* perlu dibenahi. Ketika yang dilakukan oleh siswa hanyalah kegiatan refleksi dan resensi buku, hal ini terkadang membuat siswa capek dan

akhirnya membuat siswa tidak mengerti tujuan dari kegiatan ini. *Detention* dapat dilakukan dengan kegiatan yang lebih bervariasi lagi misalnya dengan melakukan konsekuensi berdasarkan permasalahan yang membuatnya mendapatkan *detention*. Misalnya, ketika siswa terlambat dalam sesi *homeroom*, *detention* kemudian dapat menjadi tempat bagi siswa untuk menelaah bagian Alkitab yang dibahas pada devosi yang dilewatkannya dalam sesi *homeroom* tersebut.

Untuk prosedur pelaksanaan kegiatan, konselor berpendapat bahwa *detention* telah berjalan dengan baik. Dapat dilihat dengan adanya koordinator yang dengan baik menjalankan teknis kegiatan *detention*.

4.4. Analisis dan Pembahasan

Hasil data berdasarkan poin 4.3 akan dibahas melalui setiap indikator yang telah disusun oleh penulis dalam kisi-kisi instrumen (Lampiran A). Setiap indikator yang ada akan dijelaskan berdasarkan hasil dari setiap instrumen laporan magang yang digunakan penulis untuk mengukur indikator tersebut. Melalui pembahasan ini, akan dilihat proses pelaksanaan program *detention* apakah sudah sesuai dengan prosedur teknis yang tertulis dalam buku panduan pegangan guru SMA X (Lampiran H). Lebih lanjut lagi, melalui pembahasan ini akan dilihat hasil dari penerapan program *detention* terhadap perilaku siswa di SMA X.

Melalui hasil dari perhitungan setiap instrumen, penulis menemukan bahwa setiap guru telah melaksanakan prosedur dalam **indikator pertama** dengan baik. Setiap guru yang menggunakan program *detention* sebagai konsekuensi telah memiliki peraturan yang telah dikomunikasikan dan disetujui oleh setiap siswa. Adanya peraturan ini menunjukkan kasih seorang guru sebagaimana guru

tersebut membentuk suatu batasan hidup yang menunjukkan suatu kehidupan yang disiplin dari setiap siswa. Dalam kehidupan yang disiplin, Tuhan menyesh setiap orang yang dikasihi-Nya (Ibrani 12:6), sehingga landasan ini pula yang membuat peraturan dari setiap guru tersebut memiliki konsekuensi yaitu *detention*.

Hasil kuesioner siswa menunjukkan bahwa 93% (hasil pertanyaan nomor tiga) dari siswa mengetahui adanya suatu peraturan dengan konsekuensi *detention* yang telah dikomunikasikan oleh guru dan disetujui oleh seluruh siswa (Lampiran F-2). Selanjutnya, hasil lembar kuesioner guru mata pelajaran menunjukkan bahwa hanya 57% guru yang meminta persetujuan siswa dalam penetapan peraturan dan konsekuensi (Lampiran F-2). Dengan demikian, dapat dilihat bahwa dari pihak siswa, peraturan yang memiliki konsekuensi *detention* telah diketahui dan disetujui sementara itu dari pihak guru, masing-masing mereka menyatakan bahwa guru tidak perlu meminta persetujuan siswa. Guru terkesan hanya perlu menyampaikan peraturan dan dalam menyampaikan peraturan ini, guru tidak membutuhkan pendapat atau persetujuan siswa. Tanpa ada pendapat atau persetujuan siswa, peraturan tersebut akan tetap ada. Jadi, yang diperlukan guru hanyalah waktu untuk menyampaikan peraturan bukan untuk meminta persetujuan akan tetapi ketika peraturan dengan konsekuensi *detention* ini disampaikan, dari pihak siswa harus setuju akan peraturan tersebut. Keadaan ini seakan menunjukkan bahwa guru adalah seorang pemimpin otoriter yang hanya sekedar menyampaikan suatu peraturan dengan konsekuensi *detention* sehingga tidak memerlukan persetujuan atau pendapat siswa didalamnya karena dirinyalah yang berkuasa.

Menurut Wong & Wong (2009) guru menjadi satu-satunya pihak yang bertanggung jawab untuk menentukan batasan yang menjadi standar ekspektasi kehidupan yang disiplin melalui peraturan dan konsekuensi di dalam kelas. Sejalan dengan pendapat Brummelen (2006), guru memiliki wewenang dari Allah untuk menentukan cara pendisiplinan berdasarkan hikmat yang Allah berikan. Peraturan yang dibuat oleh setiap guru di SMA X bukan sekedar peraturan yang dibuat seenaknya secara pribadi akan tetapi merupakan sebuah peraturan yang berlandaskan hikmat yang diberikan Allah tersebut yang juga didasarkan pada batasan yang diberikan sekolah yaitu visi misi, profil sekolah dan profil lulusan. Hal ini juga selalu dipantau oleh pemimpin sekolah (Lampiran C-1).

Pihak sekolah memberikan kebebasan bagi guru untuk memilih menggunakan program *detention* atau tidak. Pemimpin sekolah mengerti bahwa cara pendisiplinan setiap guru berbeda-beda (Lampiran C-1). Setiap guru memiliki kebijakan masing-masing dalam menangani masalah perilaku siswa di dalam kelas. Beberapa guru memilih untuk tidak menggunakan *detention* sebagai konsekuensi karena menganggap *detention* tidak efektif dan lebih nyaman dengan penanganan/ rekonsiliasi secara pribadi (Lampiran E). Hasil perhitungan pada lembar kuesioner guru wali kelas yang menunjukkan angka 57% pada pertanyaan nomor satu sampai empat, dikarenakan adanya tiga dari tujuh guru wali kelas yang tidak menggunakan konsekuensi *detention* dalam peraturan wali kelas (Lampiran F-2).

Setiap guru yang memilih untuk menggunakan konsekuensi *detention* memiliki pertimbangan bahwa konsekuensi tersebut akan membuat siswa menyadari kesalahan atau pelanggarannya melalui proses reflektif yang terjadi

selama *detention* berlangsung (Lampiran C-2). Menurut Walters dan Frei (2007), siswa harus mengerti bahwa ada korelasi antara pelanggaran yang dilakukan siswa dengan konsekuensi yang diterimanya. Kegiatan refleksi yang dilakukan oleh siswa selama melakukan *detention* dianggap sebagai tahap awal untuk menyadari perbuatannya bahkan akhirnya mengambil komitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Menurut guru mata pelajaran SMA X (Lampiran C-2), berkenaan dengan proses refleksi, konsekuensi ini sudah berhubungan dengan pelanggaran yang dilakukan siswa meskipun kegiatan yang dilakukan setelah itu tidak memiliki korelasi lagi yaitu membaca buku, meringkas buku, atau melakukan kegiatan sosial yang lain.

Indikator kedua diukur dengan menggunakan lembar kuesioner siswa, guru wali kelas dan guru mata pelajaran. Kuesioner guru mata pelajaran mendukung pernyataan bahwa guru memberikan *detention* bagi siswa yang melakukan pelanggaran secara berulang yaitu sebanyak tiga kali atau lebih (Lampiran F-2). Menurut O'Flynn, Kennedy, dan Macgrath (2013), *detention* bermanfaat untuk memberikan pengertian kepada siswa bahwa dirinya telah gagal menghasilkan resolusi untuk tidak melanggar peraturan lagi. Ketika melakukan pelanggaran untuk pertama kalinya, siswa telah diberikan kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik untuk tidak melanggar peraturan lagi kedepannya. Akan tetapi, ketika kesempatan ini tidak digunakannya maka, siswa tersebut akan mendapatkan proses pendisiplinan selanjutnya yaitu *detention*. Untuk itu, *detention* diberikan bagi siswa yang telah melakukan pelanggaran dengan beberapa peringatan sebelumnya untuk menunjukkan adanya proses ini.

Sementara itu, lembar kuesioner siswa menunjukkan bahwa hanya 72% siswa yang setuju bahwa masing-masing mereka telah diberikan peringatan secara berulang oleh gurunya (Lampiran F-2). Hal ini menunjukkan adanya perbedaan hasil dari lembar kuesioner guru mata pelajaran dan siswa. Menurut guru mata pelajaran berdasarkan penjelasan sebelumnya, mereka telah memberikan peringatan kepada siswa sebelum memberikan *detention*. Namun dari sudut pandang siswa, mereka belum mendapatkan peringatan ini. Penulis melihat adanya kesalahan dalam pengisian lembar kuesioner siswa. Dalam pertanyaan nomor satu, 21 dari 29 siswa mengakui bahwa mereka mendapatkan *detention* karena keterlambatan yang berulang. Akan tetapi, lima orang dari siswa yang mendapatkan *detention* karena keterlambatan yang berulang tersebut menjawab tidak dalam pertanyaan nomor empat kuesioner siswa yang digunakan untuk mengukur indikator ini sehingga memberikan pernyataan bahwa mereka tidak diberikan peringatan sebelum diberikan *detention* oleh gurunya. Sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa-siswa ini adalah keterlambatan berulang yang pastinya telah diberikan peringatan ketika pertama kali pelanggaran dilakukan. Tiga siswa lainnya yang menjawab tidak dalam pertanyaan nomor empat ini bahkan memberikan pernyataan dalam nomor satu bahwa mereka mendapatkan *detention* karena telah ditegur sebanyak enam kali di kelas Matematika. Melihat hal ini, penulis memutuskan bahwa hasil 72% didapatkan melalui adanya kesalahan dalam pengisian kuesioner siswa bukan karena guru tidak memberikan peringatan terlebih dahulu kepada siswa. Hasil ini juga didukung oleh lembar kuesioner guru wali kelas. Presentase memang menunjukkan hasil 57% namun, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hasil

ini diperoleh karena ada tiga dari tujuh orang guru wali kelas yang tidak menggunakan konsekuensi *detention* (Lampiran F-2). Sedangkan keempat guru lainnya (57%) menyatakan bahwa masing-masing mereka telah memberikan peringatan yang berulang kepada siswa sebelum memberikan *detention*.

Setelah guru memutuskan untuk memberikan *detention* kepada siswa, berdasarkan **indikator ketiga**, guru yang bersangkutan harus memberitahu koordinator *detention*, nama-nama siswa yang akan melakukan *detention*. Setiap guru yang menggunakan konsekuensi *detention* melalui lembar kuesioner guru mata pelajaran dan guru wali kelas menyatakan bahwa masing-masing mereka telah melakukan hal ini. Dengan memberitahu kepada koordinator *detention*, prosedur pelaksanaan program kemudian dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu koordinator *detention* akan memberitahu wali kelas siswa tersebut nama-nama siswa dari kelas *homeroom* yang mendapatkan *detention*.

Berdasarkan **indikator keempat**, pemberitahuan dari guru koordinator kepada guru wali kelas juga harus menyertakan slip *after school detention* yang nantinya melalui wali kelas, akan diserahkan kepada siswa sehari sebelum *detention* untuk ditandatangani oleh orang tua siswa. Melalui lembar kuesioner guru wali kelas dan lembar kuesioner siswa, masing-masing pihak menyatakan bahwa siswa telah menerima slip ini sehari sebelum *detention* dilaksanakan. Dalam hal pemberian slip sehari sebelum *detention* dilaksanakan, prosedur ini telah berjalan dengan baik jika dilihat dari hasil yang ditunjukkan oleh data. Akan tetapi, dalam indikator keempat ini ada satu aspek lagi yang harus dipenuhi yaitu penandatanganan slip *after school detention* kepada orang tua siswa. Pemberian slip sehari sebelum *detention* memiliki tujuan yaitu, siswa harus mendatangi

slip tersebut kepada orang tua sebagai pemberitahuan kepada orang tua bahwa ada pelanggaran yang dilakukan siswa sehingga siswa harus mengikuti *after school detention*. Berdasarkan jawaban siswa dalam pertanyaan nomor enam di kuesioner, hanya 48% siswa yang menandatangani slip tersebut kepada orang tua (Lampiran F-2). Tujuan untuk menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua bahwa anaknya telah melakukan suatu pelanggaran tertentu, tidak tersampaikan.

Indikator selanjutnya (**indikator kelima**) menyatakan bahwa siswa harus menunjukkan slip *after school detention* kepada guru piket pada saat melakukan *detention*. Hasil menunjukkan bahwa hanya 21% siswa yang melakukan hal ini (Lampiran F-2). Jelas bahwa 48% siswa yang menandatangani slip tersebut bahkan tidak menjalankan prosedur selanjutnya dengan membawa slip pada hari pelaksanaan *detention*. Hal ini menunjukkan kurangnya koordinasi antara sekolah dan orang tua dalam penanganan masalah perilaku siswa melalui konsekuensi *detention*.

Pihak sekolah dan orang tua adalah teladan untuk suatu kehidupan dan pengajaran Kristiani yang dapat dinyatakan melalui interaksi mereka dengan anak/siswa (Daniel & Wade, 2007). Menurut Boynton & Boynton (2005), dengan adanya *detention* maka, orang tua akan lebih memerhatikan anak mereka karena orang tua mengetahui permasalahan perilaku anaknya dan seharusnya mengambil tindakan untuk hal tersebut. Dengan demikian, orang tua dapat ikut mengambil peran dalam mendidik anak mereka bersama dengan pihak sekolah untuk menangani masalah perilaku anak tersebut.

Berdasarkan **indikator keenam** koordinator *detention* memberikan slip *after school detention* ke konselor. Melalui wawancara dengan konselor, penulis menemukan bahwa koordinator *detention* selalu memberikan slip ini kepada konselor. Akan tetapi, slip yang diberikan kepada konselor tentu tidak sama dengan jumlah siswa yang mendapatkan *detention* karena berdasarkan hasil dari indikator kelima yang telah dibahas sebelumnya, penulis hanya menemukan 21% siswa yang membawa slip *after school detention* pada saat *detention* dilaksanakan (Lampiran F-2). Dengan demikian, slip yang diserahkan oleh koordinator *detention* kepada konselor hanyalah sebesar 21% dari 100% jumlah siswa yang mendapatkan *detention*.

Indikator ketujuh masing-masing pihak yaitu guru wali kelas, orang tua/ siswa, dan konselor harus memiliki/ menyimpan slip *after school detention* yang telah ditandatangani. Hasil wawancara dengan konselor menunjukkan bahwa konselor memiliki arsip masing-masing siswa yang berisi kegiatan siswa, riwayat masalah, jadwal konseling, juga lembar hasil refleksi dan slip *after school detention* dari siswa. Selain itu, 86% guru wali kelas juga memiliki/ menyimpan slip tersebut dan hasil perhitungan kuesioner siswa, hanya 10% siswa yang memiliki/ menyimpan slip *after school detention* (Lampiran F-2).

Dalam **indikator kedelapan**, dijelaskan bahwa guru harus mendata setiap siswa yang mendapatkan *detention* di buku *subject journal*, *class journal*, dan *homeroom journal*. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa 71% guru wali kelas dan 82% guru mata pelajaran telah melakukan hal ini (Lampiran F-2). Data riwayat *detention* siswa mungkin merupakan suatu hal yang kecil, akan tetapi data itu dapat digunakan untuk melihat jumlah siswa yang telah mendapatkan

detention juga jumlah *detention* yang telah diberikan kepada masing-masing siswa. Dengan demikian, dapat diketahui jumlah siswa yang telah berulang kali mendapatkan *detention* sehingga untuk siswa seperti ini dapat ditangani dengan cara pendisiplinan lainnya. Riwayat ini juga dapat menjadi sarana bagi guru lain untuk mendapatkan gambaran dari perilaku siswa tersebut.

Indikator kesembilan berisi tentang waktu dan tempat pengadaaan *detention*. Berdasarkan prosedur sekolah dalam buku panduan pegangan guru, *detention* diadakan setiap hari Selasa & Kamis 15.30-17.00 di ruangan Mr. Yudhi. Hasil lembar kuesioner siswa mengatakan bahwa hanya 69% siswa yang mengadakan *detention* sesuai dengan tempat dan waktu yang telah ditentukan (Lampiran F-2). Setelah hasil wawancara dengan guru koordinator dan lembar kuesioner guru piket, penulis menemukan bahwa *detention* dilaksanakan di ruangan guru piket bukan di ruangan guru koordinator. 69% siswa yang menjawab pertanyaan ini menjalankan *detention* di ruangan koordinator yaitu Mr. Yudhi karena selain sebagai koordinator, Mr. Yudhi juga menjadi guru piket *detention*. Berdasarkan hasil wawancara, koordinator *detention* berpendapat bahwa memang seharusnya ada ruangan khusus untuk *detention*. Akan tetapi, guru koordinator kemudian mengizinkan *detention* untuk dilaksanakan di ruangan masing-masing guru piket juga memiliki berbagai tanggungjawab yang lain sementara guru tersebut menjadi guru piket. Dengan menjalankan *detention* di ruangan masing-masing, guru tersebut dapat tetap mengerjakan tugasnya sekaligus menjadi guru piket.

Diterapkannya *detention* di suatu sekolah memiliki arti bahwa sekolah harus mencari pihak yang dapat bertanggung jawab untuk mengawasi program

detention yaitu guru atau staf sekolah atau bahkan harus menambah jumlah pegawai dan tidak semua sekolah dapat mengusahakan hal ini (U. S. Department Of Education, 2002). SMA X memiliki jumlah guru yang terbatas. Keterbatasan jumlah guru ini membuat tugas dan tanggungjawab masing-masing guru sangat banyak. Selain mengurus administrasi, mempersiapkan pengajaran, setiap guru harus memiliki tanggungjawab yang lain, diantaranya menjadi guru piket *detention*. Berdasarkan hal ini, guru koordinator *detention* melihat bahwa akan lebih efektif jika *detention* yang berlangsung setiap dua hari setiap minggu, dilaksanakan di ruangan guru piket sehingga setiap guru tersebut dapat sambil menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya di bidang yang lain.

Selama *detention* berlangsung, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh siswa dan guru piket. Indikator kesepuluh sampai keenambelas berisi setiap kegiatan yang dilakukan selama *detention* berlangsung. Awalnya, berdasarkan **indikator kesepuluh**, siswa harus mengisi daftar hadir yang disediakan oleh guru piket. Secara keseluruhan, kegiatan ini sudah cukup berjalan sesuai dengan prosedur. Daftar hadir siswa harus selalu diisi dan segera dikembalikan kepada guru koordinator sebagai bukti bahwa siswa tersebut telah mengikuti *detention*. Data siswa yang mengikuti *detention* kemudian akan direkapitulasi oleh guru koordinator sehingga jika ada siswa yang tidak menghadiri *detention* berdasarkan daftar hadir tersebut, guru koordinator *detention* harus mendaftarkan siswa tersebut untuk *detention* selanjutnya.

Berdasarkan **indikator kesebelas**, siswa harus melakukan *detention* dengan teratur dan tenang. Siswa harus mengikuti setiap kegiatan yang dilakukan selama *detention* berlangsung dengan baik mulai dari menuliskan refleksi,

membaca buku, membuat resensi buku, dan melakukan kegiatan sosial lain yang diinstruksikan oleh guru. Namun, hasil dari kuesioner siswa menyatakan bahwa 48% siswa melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan selama mengikuti kegiatan tersebut (Lampiran F-2) yaitu; tidur, membuat keributan atau berjalan-jalan. Akan tetapi, hal ini tentu tidak dibiarkan begitu saja oleh setiap guru piket. Melalui wawancara dengan guru koordinator dan hasil kuesioner guru piket, masing-masing guru selalu memastikan setiap siswa melakukan *detention* dengan tenang dan teratur. Pasti akan ada siswa yang bosan sehingga mengantuk ataupun melakukan hal lain yang seharusnya tidak dilakukan tapi, guru selalu memperingatkan siswa untuk kembali melakukan kegiatan *detention* dengan baik. Hasil kuesioner guru piket untuk pertanyaan nomor tujuh yaitu 83% diperoleh dari adanya satu dari enam guru piket yang menyatakan bahwa guru tersebut tidak memastikan siswa mengerjakan lembar ringkasan karena berdasarkan pengalamannya, waktu *detention* hanya digunakan untuk refleksi saja. Selama guru tersebut menjadi guru piket, setiap siswa mengerjakan lembar refleksi selama satu setengah jam.

Mary Ann Manos (2006) mengatakan bahwa, jika siswa harus berada di sekolah ketika jam sekolah berakhir dalam hal ini ketika *detention* berlangsung maka, harus ada pengawasan penuh dari pihak sekolah (guru/staf) untuk menjaga siswa tetap fokus terhadap kegiatan yang seharusnya dilakukannya selama *detention*. Guru memiliki tanggungjawab untuk menjaga siswa melakukan kegiatan yang seharusnya mereka lakukan. Berada di sekolah ketika jam sekolah telah berakhir, harus dipertanggungjawabkan dengan baik mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan selama berada di sekolah. Jika tidak ada manfaatnya, tentu

pihak sekolah atau guru yang bertugas saat itu akan dipertanyakan tanggungjawabnya oleh orang tua dari siswa yang bersangkutan.

Indikator selanjutnya yaitu **indikator keduabelas** berdasarkan prosedur kegiatan *detention* (Lampiran H), guru piket harus memberikan lembar refleksi yang akan dilengkapi siswa selama *detention*. Berdasarkan hasil keseluruhan instrumen yang telah melewati standar yaitu 75% (Lampiran F-2), prosedur ini telah dijalankan. Guru koordinator melalui kegiatan wawancara dengan penulis menjelaskan bahwa format refleksi telah disediakan oleh sekolah dan tugasnya hanya memperbanyak lembar tersebut dengan fasilitas *fotocopy* yang dimiliki sekolah dan menyediakan kertas yang biasanya digunakan secara umum pada saat kuis atau ulangan di SMA X.

Dalam **indikator ketigabelas**, guru mendiskusikan hal-hal penting yang harus diperhatikan siswa sesuai dengan jawaban siswa dalam lembar refleksi. Selama *detention*, guru juga bertanggung jawab dalam pembentukan pandangan siswa mengenai tindakan yang telah dilakukannya yaitu melanggar suatu peraturan tertentu. Proses ini bukan hanya tertuang dalam buku panduan pegangan guru akan tetapi penulis melihat bahwa melalui buku panduan dan pegangan siswa (Lampiran I), sekolah juga menegaskan betapa pentingnya poin ini. Dalam pembahasan nilai-nilai pendisiplinan yang dianut sekolah yang juga didasarkan pada Firman Tuhan, butir ketujuh menjelaskan bahwa tindakan pendisiplinan harus meliputi tindakan pemulihan (2 Korintus 2:7). Dilanjutkan dengan butir kedelapan yang mengatakan bahwa guru-guru wajib membina siswa dalam setiap tindakan pendisiplinan. Akan tetapi, menurut hasil dari lembar kuesioner siswa, hanya 21% siswa yang mendiskusikan tindakan pelanggarannya dengan guru

piket saat itu. Begitu pula dengan hasil kuesioner guru piket yang menyatakan bahwa hanya ada 50% guru piket yang mendiskusikan tindakan pelanggaran siswa yang menjadi alasan kenapa siswa mendapatkan *detention*. Diskusi dengan siswa terjadi ketika siswa telah selesai melakukan refleksi dalam *detention*. Diskusi dilakukan dengan guru wali kelas dari siswa yang bersangkutan. Hal ini diperoleh melalui hasil kuesioner guru wali kelas yang menunjukkan 100% guru melakukan diskusi ini (Lampiran F-2). Hasil wawancara penulis dengan guru koordinator juga menyatakan hal yang sama. Guru koordinator mengatakan, bagi setiap siswa yang hasil refleksinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sekolah, hasil tersebut akan diberikan kepada guru wali kelas untuk ditindaklanjuti dengan mengadakan diskusi dengan siswa dan jika diperlukan akan dirujuk kepada konselor.

Dengan demikian, proses pemulihan dan pembinaan terjadi bukan pada saat tindakan pendisiplinan (*detention*) berlangsung tapi, setelah tindakan pendisiplinan tersebut selesai dilaksanakan. Bukan hanya itu, proses pemulihan dan pembinaan dilakukan oleh guru wali kelas. Proses ini harusnya terjadi antara guru yang memberikan *detention* dan siswa yang menerima konsekuensi *detention* (Lampiran C-2). Mengatasi hal ini, lembar hasil refleksi seharusnya diserahkan kepada guru yang memberikan *detention*. Dengan demikian, guru tersebut mengetahui tindaklanjut dari diberikannya konsekuensi tersebut kepada siswa. Guru juga dapat mengetahui apa sebenarnya yang dirasakan oleh siswa, latar belakang kenapa siswa melanggar peraturan, dan komitmen siswa untuk mengatasi masalah perilakunya.

Setelah melakukan kegiatan refleksi, berdasarkan **indikator keempatbelas** siswa harus membaca buku yang telah disediakan guru piket. Hasil dari lembar kuesioner siswa menyatakan bahwa 38% siswa tidak membaca buku (Lampiran F-2). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan guru koordinator, buku yang dibaca siswa tidak harus berasal dari guru piket. Siswa memiliki bukunya sendiri yang biasanya digunakan untuk pelajaran Bahasa Indonesia. Akan tetapi bagi sebagian guru piket (67%), guru piket tersebut mengakui bahwa perlu bagi seorang guru piket untuk menyediakan buku yang akan dibaca siswa. Dengan demikian, buku yang dibaca juga merupakan suatu buku yang baik untuk pertumbuhan karakter siswa. Berdasarkan hasil resensi siswa (Lampiran J), buku yang diberikan oleh guru sulit untuk dipahami karena disusun berdasarkan beberapa kata yang juga sulit dimengerti. Akan tetapi, siswa tersebut juga mengakui bahwa buku yang disediakan itu baik dan berguna untuk dirinya. Selain itu, ketika siswa diizinkan membaca buku yang diinginkannya, hal itu bukan merupakan suatu bentuk konsekuensi lagi. Menurut Marzano (2003 dikutip dalam Marzano, Gaddy, Foseid, Foseid, dan Marzano, 2005) “pendisiplinan haruslah seimbang yaitu melibatkan konsekuensi positif dan negatif” (hal. 37). *Detention* merupakan suatu bentuk konsekuensi negatif yang digunakan untuk menangani perilaku siswa yang tidak disiplin. *Detention* akan menjadi suatu konsekuensi positif jika siswa diizinkan membaca buku yang disukainya karena konsekuensi positif bertujuan untuk menghargai tindakan yang dilakukannya. Siswa diberikan *detention* karena melakukan suatu pelanggaran dan hal itu tidak sepatutnya dihargai melainkan membutuhkan suatu penanganan dengan konsekuensi negatif.

Kegiatan lanjutan yang diharapkan setelah membaca buku berdasarkan **indikator kelimabelas** adalah siswa membuat ringkasan cerita dari buku yang telah dibaca pada lembar tugas yang disediakan guru piket. Berdasarkan indikator sebelumnya, 38% siswa tidak membaca buku namun, dalam indikator ini ada 52% siswa yang membuat ringkasan atau resensi buku (Lampiran F-2). Berhubungan dengan penjelasan sebelumnya, penulis melihat bahwa bagi siswa yang membaca buku yang dimilikinya sendiri, bukan buku dari guru piket, siswa sudah mengetahui isi dari buku tersebut. Dengan demikian, tanpa membaca buku tersebut, siswa dapat dengan lancar menuliskan ringkasan dari buku itu. Sama seperti penjelasan dalam indikator kesebelas, hasil 83% dari lembar kuesioner guru piket (Lampiran F-2) diperoleh karena ada satu dari enam guru piket yang tidak mengharuskan siswa untuk membuat ringkasan buku karena berdasarkan pengalamannya menjadi guru piket, siswa menghabiskan waktu *detention* untuk menuliskan refleksi sehingga kegiatan setelah refleksi yaitu membaca buku dan menulis ringkasan, tidak dilaksanakan.

Dalam **indikator keenambelas**, siswa akan melakukan kegiatan sosial yang ditentukan oleh guru piket/ koordinator *detention*. Kegiatan sosial ini dapat berupa instruksi untuk mengerjakan beberapa aktivitas selain beberapa kegiatan yang dijelaskan sebelumnya yaitu, membersihkan rak buku, merapikan tempat duduk, dan lain sebagainya sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh guru piket *detention*. Berdasarkan hasil dari kuesioner guru piket dan siswa, kedua pihak menyatakan bahwa hanya ada 33% guru piket dan 7% siswa yang melakukan hal ini (Lampiran F-2). Guru memiliki kesempatan untuk memberikan instruksi kepada siswa setelah siswa selesai mengerjakan lembar refleksi dan membaca/

meringkas buku jika masih ada waktu yang tersisa. Kesempatan ini dapat digunakan guru untuk memberikan *detention* sesuai dengan pelanggaran yang diperbuatnya. Misalnya, sebagian siswa yang menjadi responden mendapatkan *detention* karena sering terlambat dalam sesi *homeroom* yang didalamnya siswa harus melakukan devosi bersama di dalam kelas. Ketika siswa mendapatkan *detention* karena hal ini, guru piket dapat membantu siswa untuk menelaah bagian Alkitab yang dilewatkannya pada saat devosi kelas. Dengan demikian, akan terlihat adanya hubungan antara tindakan siswa dan konsekuensi yang diberikan. Melalui hal ini, siswa akan mengerti bahwa dirinya telah melewatkan suatu bagian penting dalam kegiatannya. Menurut Walters & Frei (2007), konsekuensi diberikan untuk memberikan pengertian bahwa ada korelasi antara tindakan siswa saat mengabaikan ekspektasi kelas atau sekolah, dan konsekuensi dari perbuatannya tersebut.

Indikator ketujuhbelas, berisi tentang prosedur selanjutnya yang harus dilakukan oleh guru piket setelah *detention* telah selesai dilaksanakan yaitu, memberikan hasil *detention* siswa kepada guru koordinator. Berdasarkan hasil instrumen, dapat dilihat bahwa prosedur ini telah berjalan dengan baik. Menurut guru koordinator, hasil *detention* harus segera dikembalikan karena peralatan (lembar absensi, pertanyaan refleksi, dan format resensi) hanya ada satu sedangkan *detention* dilaksanakan dua kali seminggu. Guru koordinator harus segera membuat rekapitulasi data berdasarkan hasil tersebut sehingga guru piket harus segera menyerahkan hasil *detention*.

Dalam **indikator kedelapanbelas**, wali kelas akan berkoordinasi dengan konselor untuk pembinaan lebih lanjut bagi siswa yang melakukan pelanggaran

yang berulang. Berdasarkan hasil kuesioner, hanya ada 12% siswa yang mendapatkan bimbingan ini. Hal ini dikarenakan, hanya ada beberapa siswa yang melakukan pelanggaran berulang kali terlihat dari jumlah konsekuensi *detention* yang diterimanya yang menunjukkan lebih dari satu kali. Wawancara yang dilakukan penulis dengan konselor juga menunjukkan hasil bahwa hanya siswa yang melakukan pelanggaran berulang kali saja yang mendapatkan bimbingan dari konselor berdasarkan rujukan dari wali kelas. Dari pihak guru, setiap guru menyatakan selalu berkoordinasi dengan konselor jika ada siswa yang melakukan pelanggaran berulang kali.

Indikator kesembilanbelas, mengatakan bahwa guru memberikan surat peringatan dan sanksi (siswa dirumahkan) bagi siswa yang tidak mengikuti *detention* sebanyak tiga kali berturut-turut. Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan guru koordinator (Lampiran C-3), penulis menemukan bahwa ketika siswa tidak mengikuti *detention* sebanyak empat kali sesuai jadwal yang telah ditetapkan, siswa akan mendapatkan konsekuensi yaitu melakukan kegiatan sosial di Panti Asuhan Kasih. Jika siswa tidak menghadiri kegiatan sosial tersebut, barulah sekolah kemudian memberikan surat peringatan yang berisi pernyataan bahwa siswa harus dirumahkan selama beberapa waktu tertentu.

Dalam **indikator keduapuluh**, koordinator *detention* harus mengarsipkan dan menyerahkan hasil *detention* siswa kepada kepala sekolah dan wali kelas. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru koordinator, penulis menemukan bahwa hasil yang diserahkan adalah hasil *detention* yang masih bermasalah. Bagi siswa yang telah memenuhi ekspektasi sekolah dalam pengisian lembar *detention*, maka hasil dari siswa tersebut akan diarsipkan oleh guru koordinator tidak perlu

diserahkan kepada wali kelas atau kepala sekolah. Kepala sekolah juga menyatakan hal yang sama dalam wawancara. Akan tetapi, kepala sekolah selalu mengadakan evaluasi dan selalu menerima laporan dari guru koordinator secara formal maupun informal, dalam kurun waktu tertentu. Indikator ini juga berhubungan dengan **indikator kedua puluh satu**, yang berisi; kepala sekolah dan wali kelas memiliki arsip lembar hasil refleksi siswa. 57% guru wali kelas memiliki arsip lembar hasil refleksi siswa (Lampiran F-2). Hasil menunjukkan angka yang tidak signifikan karena hanya siswa yang masih bermasalah dalam penulisan refleksi *detention* yang dikembalikan kepada guru wali kelas sementara itu, sebagian besar siswa telah menuliskan hasil refleksi sesuai dengan ekspektasi sekolah.

Indikator terakhir yaitu **indikator kedua puluh dua**, digunakan penulis untuk melihat hasil dari pelaksanaan program *detention* di SMA X. Hasil dilihat berdasarkan pendapat masing-masing pihak yang terlibat dalam program ini mengenai perubahan perilaku siswa setelah melaksanakan *detention*.

Dari pihak para guru dan kepala sekolah, *detention* telah berdampak baik dalam perubahan perilaku siswa menjadi lebih disiplin. Akan tetapi, perubahan ini memang tidak bisa disamaratakan kepada seluruh siswa. Bagi sebagian besar siswa, *detention* memberikan dampak yang baik tetapi, bagi sebagian kecil lainnya menurut setiap guru di SMA X, *detention* merupakan suatu konsekuensi yang terlalu “lembut” sehingga tidak memiliki dampak apapun. Dapat dilihat dari pelanggaran yang tetap selalu dilakukannya dan berulang kali mendapatkan *detention*. Menurut Sprick (2013), program *detention* tidak akan efektif bagi siswa yang sudah berulang kali mendapatkan *detention*. Dengan demikian *detention*

harusnya merupakan salah satu dari rangkaian pemberian konsekuensi sebelum akhirnya sekolah memutuskan untuk memberikan skors bagi siswa yang mendapatkan *detention* berulang kali (U. S. Department Of Education, 2002). Sampai saat ini, SMA X tidak memberikan konsekuensi lanjutan ketika siswa tersebut telah melaksanakan *detention* berulang kali. Berdasarkan data, terdapat beberapa siswa yang telah mendapatkan *detention* sebanyak empat kali.

Dari sisi siswa, berdasarkan hasil kuesioner, hanya 59% siswa yang menyatakan dirinya menjadi lebih baik setelah menjalankan *detention* (Lampiran F-2). Melalui pertanyaan terbuka yang diberikan penulis dalam kuesioner, sebagian besar siswa menyatakan bahwa mereka jera ketika menerima konsekuensi *detention*. Menurut Harris (2006) bagian yang paling “menghukum” dari program *detention* adalah para siswa kehilangan waktu bersosialisasi dengan teman sebayanya ketika jam sekolah berakhir. Hal inilah yang menimbulkan efek jera dengan adanya rasa bosan yang dirasakan oleh siswa selama *detention* karena menurut para siswa, mereka dapat melakukan kegiatan lain daripada hanya menghabiskan satu setengah jam di sekolah.

Efek jera yang diberikan oleh program *detention* ini kemudian tidak membuat program ini telah mencapai tujuan yang diharapkan. Melalui program ini, siswa diharapkan dapat belajar menjadi pribadi yang reflektif sehingga dapat menyadari kesalahannya dan berkomitmen untuk menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya melalui beberapa langkah praktis yang dapat dilakukannya. Setiap siswa memang menyadari adanya efek jera ketika selesai melaksanakan *detention* dan berkomitmen untuk tidak melakukan pelanggaran lagi. Akan tetapi hal ini dilakukan hanya karena efek jera tersebut bukan karena siswa menyadari bahwa

yang dilakukannya adalah suatu pelanggaran dan seharusnya tidak diulangi lagi. Beberapa siswa bahkan dengan jujur dan terbuka memberikan kata-kata yang tidak menyenangkan dan menyalahkan sekolah yang memiliki begitu banyak peraturan yang menyebabkan mereka harus menerima *detention* (Lampiran J).

Bagi siswa, SMA X hanyalah sekolah dengan banyaknya peraturan yang memiliki konsekuensi *detention* sehingga hal ini tidak menunjukkan kasih Kristus yang memaafkan dan memberi pengampunan (Lampiran J). Yesus Kristus memang mati di atas kayu salib untuk semua manusia berdosa. Akan tetapi, kasih dan pengampunan atas dosa manusia dalam karya keselamatan ini tidak secara otomatis meniadakan tanggungjawab manusia berdosa dan berharap untuk tidak menerima konsekuensi dari pelanggaran yang dibuatnya. Dalam Ibrani 12:6 Tuhan berfirman “karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakui-Nya sebagai anak”. Daud melakukan tindakan yang dipandang jahat di mata Tuhan dengan melakukan perzinahan dan merencanakan pembunuhan Uria hanya demi seorang wanita yang diinginkannya (2 Samuel 11). Alkitab mencatat Daud sebagai seorang yang berkenan di hati Tuhan (Kisah Para Rasul 13:22) namun, status ini tidak meniadakan konsekuensi dari perbuatannya melanggar perintah Tuhan. Daud harus merelakan anaknya mati karena perbuatannya tersebut.

Dengan demikian melalui *detention*, siswa diharapkan dapat melihat betapa berdosanya manusia sehingga manusia membutuhkan kasih Yesus dalam proses pengampunan. Akan tetapi, proses ini harus disertai dengan adanya suatu konsekuensi tertentu sebagai hasil dari perbuatan dosa. Untuk itu, siswa diharapkan dapat melihat bahwa yang dibutuhkan bukanlah meniadakan peraturan

dan konsekuensi namun, ketaatan siswa untuk hidup dalam batasan atau peraturan dan menjalani konsekuensi ketika siswa mencoba untuk keluar dari batasan tersebut.

Selain itu *detention* harusnya membuat siswa mengerti pentingnya kegiatan refleksi dalam kehidupan mereka. Menurut Bowen, Jenson, dan Clark (2004), tidak hanya memberikan efek jera, waktu yang digunakan untuk menjalankan *detention* harus menjadi waktu untuk merefleksikan betapa seriusnya pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Lebih lanjut lagi, menurut Swindoll (2009), orang Kristen harus menjadi pribadi yang memiliki gaya hidup reflektif yaitu menjadi orang yang selalu berpikir dan sering mengajukan pertanyaan dalam menjalani hidupnya. Kegiatan refleksi yang dijadikan sebagai konsekuensi seakan memberikan kesan kepada siswa bahwa refleksi dilakukan hanya ketika manusia melakukan kesalahan. Pertanyaan dalam refleksi mengenai hal apa yang telah dilakukan, bagaimana hal itu bisa terjadi, kenapa hal itu bisa terjadi, dan bagaimana melakukan hal yang lebih baik kedepannya, tidak hanya ditanyakan ketika kesalahan dilakukan tetapi harus menjadi dasar dalam melakukan segala sesuatu dalam rangka proses pengudusan yang setiap hari berusaha menjadi manusia yang lebih baik dan serupa dengan Kristus.